



**Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)**

**Volume 8 (1): 18-33, Mei (2021)**

**Website <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jppm/index>**

**Email: [jurnal\\_pls@fkip.unsri.ac.id](mailto:jurnal_pls@fkip.unsri.ac.id)**

**(p-ISSN: 2355-7370) (e-ISSN: 2685-1628)**



naskah diterima: 17/01/2021, direvisi: 17/06/2021, disetujui: 23/06/2021

## **METAMORFOSA WAJAH KURIKULUM: Sejarah Perkembangan Acuan Pendidikan di Indonesia**

**Fahyumi Rahman**

*Universitas Negeri Jakarta*

Email: [Fahyumi29rahman@gmail.com](mailto:Fahyumi29rahman@gmail.com)

**Abstrak:** Transformasi kurikulum beranjak dari sebelum kemerdekaan, yang eksistensinya masih dalam otoritas kolonial belanda. Rancangan dan pelaksanaan pendidikan juga, hanya berorientasi pada kepentingan penjajahan kolonial. Ketika kemerdekaan Indonesia di proklamirkan tahun 1945, seluruh system di Indonesia di rekontruksi kembali, termasuk pada bidang pendidikan. Perubahan kurikulum tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor yang di antaranya tidak relevan untuk tujuan nasional, kebijakan pemerintahan, dan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Tulisan ini bertujuan untuk meretrospeksi perkembangan kurikulum guna menjawab atau merancang kurikulum pendidikan di masa depan. Hal tersebut penting dilakukan dalam melihat pengaruh dari kurikulum terhadap arah pembangunan nasional. Tulisan ini menggunakan studi literature dengan menggali sumber-sumber pustaka dan dikemas dalam analisa deskriptif. Hasil yang di peroleh dari tulisan ini yaitu kurikulum *leerplan* menjadi awal kurikulum pendidikan di Indonesia yang bentuknya masih sederhana. Perkembangan pemerintahan orde baru hingga orde lama perubahan kurikulum mengalami peningkatan yang signifikan, terutama untuk menjalankan cita UUD dan Pancasila. Kemudian kurikulum era reformasi, kekhasan kurikulum pada zaman ini yaitu mulai merambah keterampilan yang di masukan pada landasan pendidikan, di sempurnakan kembali pada fase kurikulum berbasis kompetensi, KTSP lalu kemudian K13.

**Kata kunci:** Kurikulum, Pendidikan, Reformasi

**Abstract:** *The curriculum transformation started from before independence, where its existence was still under the Dutch of colonial authority. The design and implementation of education were only to oriented to the interests of colonial colonialism. When Indonesia's independence was proclaimed in 1945, the entire system in Indonesian was reconstructed, including in the field of the education. The change in the curriculum was caused by several factors, including irrelevance for the national goals, government of policies, and the projections of future human resource needs. The aims of paper is to retrospect on the curriculum development in order to answer or reconstruct of educational curriculum in the future. That is important in to seeing to influence of the curriculum on the direction of national development. This paper uses literature study by exploring library sources and packaged in descriptive analysis. The results obtained from this paper are that the Leerplan curriculum is the beginning of the education curriculum in Indonesia, which is still simple in shape. The development of the New Order government to the old order, curriculum changes experienced a significant increase, especially to carry out the ideals of the Constitution and Pancasila. And then, the curriculum in the reform era, the uniqueness of the curriculum at this time, is starting to explore the skills that are input on the educational foundation, refined again in the competency-based curriculum phase, KTSP and then K13.*

**Keywords:** Curriculum, Educations, Reformasi.

## **PENDAHULUAN**

Ki Hajar Dewantara seorang tokoh pendidikan Indonesia pernah mengatakan bahwa “*Pendidikan itu semestinya dapat menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman*”. Selaras dengan pernyataan tersebut, landasan sebuah pendidikan tentunya diharapkan sesuai dengan kedua keadaan tersebut. Kebaruan dalam segala strategi atau sistem untuk mencapai tujuan sangat fundamental. Problematika pendidikan Indonesia dengan jumlah populasi penduduk terbesar ke-4 di dunia merupakan penobatan yang membelenggu Indonesia perihal kualitas penduduknya masih belum sebanding dengan kuantitasnya. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan menjadi faktor utama yang mempengaruhi permasalahan buruknya kualitas pendidikan Indonesia.

Selain itu efisiensi penyelenggaraan kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia juga belum optimal dalam realisasinya di lapangan. Selain itu adanya dikotomi perubahan yang berkaitan dengan pemerintahan juga tidak lepas dari pengaruhnya terhadap sistem yang ada. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang terdidik untuk menopang rencana pembangunan nasional juga merupakan sebab kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami perubahan. Jika ditinjau dari sudut pandang *historis* dari masa ke masa, determinan paradigma politik dan kekuasaan yang secara bersama-sama mewarnai dan mempengaruhi secara kuat sistem pendidikan Indonesia selama ini. (Alhamudin, 2014).

Disisi lain berlakunya landasan pendidikan di Indonesia yang terpusat atau *top down* hanya berorientasi pada wilayah tertentu tidak serta merta menjangkau keseluruhan wilayah Indonesia yang seluruh komponen pendidikannya terjadi kesenjangan dengan pendidikan di wilayah perkotaan. Hal tersebut juga sudah barang tentu menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kurikulum di Indonesia. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial, ekonomi dan politik. “Visi pendidikan adalah memperoleh kritik terhadap sistem dominan sebagai bentuk pemihakan terhadap rakyat kecil yang tertindas untuk menciptakan sistem sosial baru yang adil. Dalam perspektif kritis pendidikan harus mampu mengidentifikasi, menganalisis kepincangan sosial dan mengembalikan jati diri manusia sebagai mahluk yang bermartabat”. (Rahardjo 2001 : 18-22).

Begitu besar fungsi landasan sebuah pendidikan dalam memacu laju performa peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pada perkembangannya kurikulum mengalami signifikansi perubahan yang menyesuaikan perkembangan zaman dan beorientasi pada tujuan nasional. Fase awal lahirnya landasan pendidikan adalah dari zaman kolonialisme, pasca-kemerdekaan hingga masa reformasi. Pengembangan kurikulum merupakan suatu gagasan atau praktek kurikulum baru dengan menggunakan bagian-bagian yang potensial, dari kurikulum tersebut dengan harapan untuk memecahkan masalah atau mencapai suatu tujuan. (Ritonga, 2018).

Restropeksi perkembangan kurikulum perlu di lakukan dalam menjawab kebutuhan zaman dan penyesuaian dengan problem atau tantangan implementasi kurikulum-kurikulum sebelumnya. Pada dasarnya landasan kebijakan pembuatan kurikulum tentunya sangat di pengaruhi oleh pengampu kebijakan di Indonesia. Oleh karena itu pengembangan kurikulum selalu mengalami dinamika perubahan yang berbeda dari setiap masa. Perubahan kurikulum juga di sebabkan oleh beberapa substansi yang sudah tidak efektif untuk menjawab kebutuhan zaman. Maka dari itu, perubahan sistem kurikulum di ambil yaitu untuk membentuk sebuah sistem acuan pendidikan yang ideal dan terintegrasi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penulisan yang di lakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang mencakup kajian melalui sumber empirik dan studi pustaka. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran sumber di antaranya studi literasi dan studi dokumen. Metode Analisis data menggunakan reduksi data yang kemudian di analisis secara deskriptif melalui pengembangan gagasan secara spesifik.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Secara epistemologi kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya pemacu atau pelari dan *curere* yang berarti lintasan ataupun tempat pacuannya. Secara umum kurikulum dapat di artikan sebgai sebuah landasan untuk mencapai tujuan. Menurut Ritonga, (2018) memiliki pendapat bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Berkaitan

dengan konteks pendidikan, kurikulum menjadi sebuah alat yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan antara seorang pengajar dengan peserta didik. Maka tak heran jika terdapat pola perubahan kurikulum yang tidak menentu tempo waktunya.

Jika dilihat dari sejarah perkembangannya, kurikulum pendidikan di Indonesia yang dimulai tahun 1945 sangat banyak sekali perubahan tahun 1947 kurikulum rencana pelajaran dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai, 1964 Rencana Pendidikan Sekolah Dasar, 1968 Kurikulum Sekolah Dasar, 1973 kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), 1975 Kurikulum Sekolah Dasar, 1984 Kurikulum 1984, 1994 Kurikulum 1994, 1997 revisi Kurikulum 1994, 2004 rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan saat ini akan diperbaharui menjadi kurikulum 2013. (Marlina, 2013).

## **1. WAJAH KURIKULUM PRA-KEMERDEKAAN**

Pra kemerdekaan Indonesia masih dalam landasan pendidikan yang konvensional dan tradisional. Hal itu disebabkan karena pendidikan formal masih belum banyak terdapat di tanah air Indonesia. Perkembangan yang terjadi adalah system pendidikan pesantren yang umumnya banyak di temukan di jajaran pulau jawa. Eksistensi pesantren tersebut tidak serta merta memiliki sebuah system pendidikan yang tertulis dan kaku. Namun pada tradisi masyarakat pesantren proyeksi makna kurikulum itu tertuang dari pimpinan pesantren itu sendiri dengan kata lain *Kiayi* atau pun gurunya itu adalah kurikulumnya. Maka tak heran jika ditemukan banyak perbedaan pola pendidikan di setiap pesantren Indonesia.

Selain dominasi pesantren sebagai pendidikan tradisional kurikulum pendidikan di Indonesia juga di pengaruhi oleh penjajah. Kolonial. Pada zaman kolonial belanda kurikulum pendidikan atau lembaga pendidikan lebih berorientasi untuk menunjang sepak terjang penjahan dalam merampas hasil bumi. Menurut Ritonga, (2018), terdapat dua model pendidikan pada masa kolonial ini, yaitu pertama, sekolah kelas dua yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan tiga tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi berhitung, menulis, dan membaca. Kedua, sekolah kelas satu yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikannya

empat tahun, kemudian lima tahun dan terakhir tujuh tahun. Kurikulum yang diajarkan, meliputi ilmu bumi (geografi), sejarah, dan ilmu hayat (biologi).

Kolonial belanda juga membentuk jenjang pendidikan menengah dengan nama *gymnasium*. Namun masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan di pendidikan menengah (*gymnasium*) tersebut di batasi hanya untuk golongan kelas atas atau masyarakat kelas ningrat. Masa belajar pendidikan ini berlangsung selama tiga tahun. Mata pelajaran yang di ajarkan, meliputi Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Ilmu Hitung, Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu Alam atau Kimia, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah dan Tata Buku. Kemudian model pendidikan *gymnasium* berubah menjadi MULO (*Meer Uifgebried Order Wijs*) yang lama pendidikannya empat tahun. (Ritonga, 2018).

Selain dari adanya jenjang pendidikan menengah untuk kelas ningrat. Kolonial belanda juga membentuk sebuah lembaga pendidikan jenjang atas yang di sebut dengan AMS (*Algemene Middelbare School*). Selaras dengan pendapatnya Ritonga (2018), Lama pendidikan AMS ini berlangsung selama tiga tahun yang terbagi pada bagian A dan B. Bagian A spesifikasinya adalah Ilmu Kebudayaan yaitu kesastraan timur dan kesastraan klasik Barat. Adapun bagian B klasifikasinya adalah ilmu pengetahuan kealaman yang meliputi ilmu pasti (*mathematic*) dan ilmu alam.

Belanda menduduki Indonesia sebagai negar jajahannya berangsur selama 350 tahun lamanya sehingga dominasi peran kurikulum pendidikan seluruhnya hasil dari design orientasi tujuannya. Ketika kolonialisme beralih dari Belanda ke Jepang, maka pendidikan yang dibentuk oleh kolonial Belanda diganti dengan model pendidikan berciri khas Jepang. Pendidikan tingkat rendah, Jepang menggantinya dengan sebutan *Kokumin Gako* dengan lama pendidikan enam tahun. Design pendidikan yang di buat oleh penjajah jepang lebih banyak berorientasi pada keamanan dan pertahanan.

## **2. WAJAH KURIKULUM PENDIDIKAN PASCA KEMERDEKAAN**

Intervensi substansi kurikulum pasca kemerdekaan lebih dominan mengutamakan pengembangan dan perintisan Negara kesatuan republic Indonesia. Awal sejarah perombakan kurikulum yang tadinya berorientasi pada kepentingan pejahah kolonial belanda dan jepang dirubah orientasinya menjadi kebutuhan negeri.

### **(1). Kurikulum Rencana Pelajaran (*Leerplan*) Tahun 1947**

Rancangan acuan pendidikan ini merupakan kurikulum pertama yang lahir setelah masa kemerdekaan Negara Indonesia. Pada masa tersebut kurikulum pendidikan masih menggunakan istilah-istilah Belanda yaitu *leer plan* atau rencana pelajaran. Rencana pelajaran merupakan kemasan kurikulum yang di dalamnya terdapat nilai-nilai UUD yang berasaskan pada Pancasila. Namun kemasan kurikulum ini masih terbilang sangat sederhana dan tidak mencakup rencana pembelajaran secara kompleks.

Rencana pelajaran 1947 ini baru digunakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950, yang mana dalam rencana pelajaran ini memuat dua hal pokok yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya serta garis-garis besar pengajaran. Selain itu rencana pelajaran ini belum difokuskan pada ranah kognitif namun ditujukan untuk pendidikan watak dan perilaku, sehingga materinya pun meliputi kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi juga dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari serta memberikan perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. (Asri, 2017).

## **(2). Rencana Pelajaran 1952 (Pengembangan)**

Menurut Pardini (2017) Cikal bakal adanya kurikulum Rencana Pelajaran 1952 adalah pengembangan atau uraian kurikulum *leerplan* 1947 yang dipusatkan lagi dalam bentuk rencana pelajaran Terurai 1952. Hanya saja kurikulum ini hanya terbatas pada mata pelajaran: Bahasa Indonesia, Bahasa daerah, berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi dan Sejarah. Hal tersebut merupakan konsen utama yang mempengaruhi adanya fase 1952 perihal penambahan substansi kurikulum yang masih dirasa kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rencana pelajaran terurai 1952 adalah hasil pengembangan atau penyempurnaan Rencana Pelajaran 1947. Pada fase ini pendidikan sudah mulai menata tujuannya.

## **(3). Rencana Pendidikan Tahun 1964**

Pada tahun 1960, Pemerintahan Era Demokrasi Terpimpin atau yang dikenal kemudian dengan istilah Orde Lama mencetuskan lima konsepsi pendidikan yang disebut "*Pancawardhana*" (lima pokok perkembangan). Ini merupakan kritik atas sistem pendidikan yang dianggap masih terlalu mementingkan aspek intelektualistis serta masih terbawa sistem pendidikan kolonial. Adapun isi *Pancawardhana* itu menurut Kartodirjo, dkk (1976) dalam Pardini (2017), adalah sebagai berikut :

- a. Perkembangan cinta bangsa dan tanah air dan masalah moral nasional
- b. Perkembangan intelegensi
- c. Perkembangan *emosional-artistic* atau rasa keharuan dan keindahan lahir – batin
- d. Perkembangan keprigelan (kerajinan tangan)
- e. Perkembangan jasmani.

#### **(4). Kurikulum Tahun 1968 (Rencana Pendidikan Sekolah Dasar)**

Setelah kurikulum rencana pendidikan dengan kekhasan “*Panca Wardhana*” nya, lahirlah pengembangan landasan pendidikan yang berasaskan pancasila Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. (Alhamudin, 2014).

Kurikulum 1968, tidak lepas dari pengaruh rezim orde lama yang mengharapkan generasi muda terutama para pelajar memiliki jiwa pancasilais. Substansi yang sebelumnya tidak ada pada acuan pendidikan 1964, karena hanya berorientasi pada kognitif dan psikomotorik. Lahirnya kurikulum ini juga di nobatkan sebagai produk system orde lama yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai pancasila dalam pendidikan.

#### **(5). Kurikulum Sekolah Dasar 1975**

Kurikulum ini memiliki unsur-unsur yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan kurikulum yang ada sebelumnya. Selain lebih lengkap, Kurikulum 1975 telah menampilkan susunan yang lebih luas dan kompleks tidak sesederhana kurikulum sebelumnya yang lebih banyak membahas daftar jam pelajaran dan garis-garis besar program pengajarannya saja. Di sisi lain, rancangan pembelajaran yang tersedia pada kurikulum ini, juga memudahkan guru dalam hal rencana perancangan pembelajarannya di sekolah dikarenakan konsep yang sudah tersedia di dalam konten kurikulum 1975 ini.

Menurut Jasin (1987) dalam Pardini (2017) Kurikulum tahun 1975 ini terdiri dari 7 unsur pokok yaitu sebagai berikut:

- a. Dasar, tujuan dan prinsip-prinsip,
- b. struktur program kurikulum,
- c. garis-garis besar program pengajaran,
- d. sistem penyajian,
- e. sistem penilaian,
- f. sistem bimbingan dan penyuluhan, dan
- g. pedoman supervisi dan administrasi

#### **(6). Kurikulum 1984**

Kurikulum 1984 pada hakikatnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Asumsi yang mendasari penyempurnaan kurikulum 1975 ini adalah bahwa kurikulum merupakan wadah atau tempat proses belajar mengajar berlangsung yang secara dinamis, perlu senantiasa dinilai dan dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Kurikulum 1984 memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berorientasi kepada tujuan instruksional (perintah).
- b. Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif (CBSA). Focus pendekatan belajar ini lebih mengutamakan keaktifan siswa ketika belajar atau *Student oriented*.
- c. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Atau pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran.
- d. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah mengerti.
- e. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Pemberian materi pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental
- f. Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memberikan intervensi kepada proses pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan



hasil rekonstruksinya. Pendekatan keterampilan proses diupayakan dapat di aplikasikan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pelajaran. (Wirianto, 2014).

Selain beberapa kekhasan kurikulum 1984 diatas, terdapat juga beberapa kebijakan dan penambahan unsur-unsur kurikulum di antaranya penambahan mata pelajaran inti yang awalnya hanya berjumlah 8 menjadi 16 mata pelajaran inti ditambah lagi penambahan pelajaran pilihan yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Pada kurikulum fase tahun tersebut perubahan lebih banyak mempengaruhi pada sekolah yang berada pada jenjang menengah atas. Jika pada kurikulum 1975 terdapat 3 jurusan yaitu IPA, IPS, dan Bahasa maka pada kurikulum 1984 ini jurusan dinyatakan dalam program A dan B. Program A terdiri dari: (1) A1, penekanan pada mata pelajaran Fisika; (2) A2, penekanan pada mata pelajaran Biologi; (3) A3, penekanan pada mata pelajaran Ekonomi; (4) A4, penekanan pada mata pelajaran Bahasa dan Budaya. Sedangkan program B adalah program yang mengarah kepada keterampilan kejuruan yang akan dapat menerjukkan siswa langsung berkecimpung di masyarakat. Tetapi mengingat program B memerlukan sarana sekolah yang cukup maka program ini untuk sementara ditiadakan. (Asri, 2017).

### **3. WAJAH KURIKULUM PENDIDIKAN ERA REFORMASI**

Polemik pemerintahan orde baru yang memuncak pada tahun 1998, selain menimbulkan konflik nasional juga mempengaruhi struktur kurikulum pendidikan. Pengembangan kurikulum yang sebelumnya hanya berfokus pada keterampilan dan kognitif siswa. Era Reformasi ini pendidikan lebih berorientasi pada kebutuhan kerja pada awalnya. Kurikulum fase awal reformasi dikemas dalam pendidikan yang menghasilkan tenaga-tenaga kompeten untuk pemenuhan kebutuhan korporasi. Hingga perombakan sering terjadi dan sampai pada puncaknya yaitu tercipta K13. Berikut generalisasi dari fase perkembangan kurikulum di Era Reformasi.

#### **(1). Kurikulum 1994**

Kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan sosial di masa depan sehingga membutuhkan keahlian tertentu sebagai bagian dari modal melakukan kehidupan secara

mandiri. Sehingga pendidikan diarahkan pada pembentukan karakter anak yang memiliki kemampuan dasar siap bekerja dengan skill yang baik sehingga bisa digunakan di perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik atau lebih tepatnya, pendidikan bertujuan untuk memproduksi tenaga berpendidikan yang siap pakai. (Ritonga, 2018)

Sehingga banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998, diikuti kehadiran Suplemen Kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. (Alhamudin, 2014).

## **(2). Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2004**

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau Kurikulum 2004, adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004 walau sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak sebelum diterapkannya. Munculnya gagasan tentang Kurikulum KBK ini tidak lepas dari adanya pengaruh desentralisasi pendidikan serta kebutuhan akan lulusan sekolah yang berkompeten. Secara materi, sebenarnya kurikulum ini tak berbeda dari Kurikulum 1994, perbedaannya hanya pada belajar siswa di sekolah.

Karakteristik KBK antara lain mencakup seleksi kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan kesuksesan pencapaian kompetensi, dan pengembangan sistem pembelajaran. Di samping itu, KBK memiliki sejumlah kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, penilaian dilakukan berdasarkan standar khusus sebagai hasil demonstrasi kompetensi yang ditunjukkan oleh peserta didik, pembelajaran lebih menekankan pada kegiatan individual personal untuk menguasai kompetensi yang dipersyaratkan, peserta didik dapat dinilai kompetensinya kapan saja bila mereka telah siap, dan dalam pembelajaran peserta didik dapat maju sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing (Putrayasa.2006).

Depdiknas (2002), mengemukakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada kompetensi peserta didik baik secara individual maupun klasikal
- b. Berorientasi pada hasil belajar (*learning out comes*) dan keberagaman
- c. Pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi
- d. Variasi Sumber belajar yang memenuhi unsur edukatif
- e. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Dari beberapa rumusan tentang karakteristik kurikulum berbasis kompetensi di atas jelaslah bahwa pada pencapaian kompetensi itu dilihat dari cara penyampaian materi oleh guru dan metode yang digunakan dalam pembelajaran lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penilaian Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah dilihat dalam kompetensi guru dalam persiapan mengajar, artinya ada upaya guru untuk menguasai materi yang memenuhi syarat atau unsur edukatif. Hal tersebut dikarenakan yang diinginkan dalam kompetensi ini adalah menekankan pada kualitas siswa, dan hasil belajar yang dicapai.

### **(3). Kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) Tahun 2006**

Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1, ayat 15) dikemukakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut.

- a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya

- b. Beragam dan Terpadu
- c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
- e. Menyeluruh dan Berkesinambungan
- f. Belajar sepanjang hayat (*Long life education*)
- g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman peserta didik, kondisi daerah dengan tidak membedakan perbedaan status social agama maupun kesukuan.

#### **(4). KURIKULUM 2013**

Kebijakan yang di keluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan lahirnya Kurikulum 2013 atau biasa di sebut K13, hanya berfokus pada perubahan konseptual saja, namun secara praktis kebiasaan lama masih terwujud dalam kurikulum baru sehingga pelaksanaan kurikulum baru belum berjalan baik sepenuhnya. Muncul ide perihal landasan pendidikan K13 ini, dikarenakan melihat pesatnya kemajuan teknologi dan kebutuhan akan pengetahuan modern. Sehingga focus utama kurikulum 2013 lebih banyak kepada aspek pengetahuan atau kognitif. Perbedaan lain dapat di lihat pada standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan dan mencipta. Selain belajar juga tidak hanya terjadi di ruang kelas tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pembelajaran sikap tidak hanya diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. (Asri, 2017).

Kurikulum 2013 sejatinya masih Kurikulum Berbasis Kompetensi juga. Pengembangan kurikulum lebih mengutarakan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL.. Isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) mata pelajaran dan dirinci lebih lanjut ke dalam Kompetensi Dasar (KD). Keberadaan Kompetensi Inti ini yang membedakan dengan KTSP 2006 dan KBK 2004. Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris kompetensi bukan konsep, generalisasi, topik atau sesuatu yang berasal dari pendekatan “*disciplinary-based curriculum*” atau “*content-based curriculum*” (Kemendikbud, 2013)

#### 4. METAMORFOSA KURIKULUM DI INDONESIA

**Tabel 1. Perkembangan Kurikulum di Indonesia**

Tahun	Periode Politik	Nama Kurikulum	Landasan Pendidikan
1945 – 1949	<b>REVOLUSI FISIK</b>	1. Rencana Pelajaran ( <i>Leerplan</i> )1947	
1949 – 1950	<b>MASA RIS</b>		Muncul UU Pendidikan 1950
1950 – 1959	<b>DEMOKRASI PARLEMENTER</b>	2. Rencana Pelajaran Terurai 1952	UU Pendidikan 1954
1959 – 1966	<b>ORDE LAMA</b>	3. Rencana Pendidikan 1964	Keluar Penpres No.19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila
1966 – 1998	<b>ORDE BARU</b>	4. Kurikulum 1968	
		5. Kurikulum 1975	
		6. Kurikulum 1984	
		7. Kurikulum 1994	UU No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
1998 – Sekarang	<b>ERA REFORMASI</b>	(Kurikulum 1994 - Suplemen 1999)	
		8. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004	UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
		9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006	PP. No. 19 Tahun 2005
		10. Kurikulum Nasional 2013	PP. No. 32 Tahun 2013

(Sumber : Agung Pardini, 2018).

Pada tabel 01. Agung Pardini memaparkan bahwasanya faktor perubahan politik, kurikulum berkembang atau dirubah karena terjadi perubahan situasi politik atau juga karena adanya pergantian kepemimpinan nasional. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 di masa awal kemerdekaan terbentuk dikarenakan masih adanya semangat yang tinggi untuk merekontruksi system kurikulum sekolah yang masih dipengaruhi oleh model

pendidikan zaman kolonial Belanda. Sedangkan kurikulum 1964, disusun untuk menguatkan doktrin-doktrin politik pemerintahan Orde Lama atau yang dikenal juga dengan zaman Demokrasi Terpimpin sehingga lahir kurikulum *pancawardhana*.

Kondisi dan situasi nasional menyebabkan kurikulum berkembang atau mengalami perombakan seiring dengan dinamika yang terjadi pada kondisi masyarakat dan perencanaan pembangunan nasional dalam merespon perubahan zaman. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kurikulum relatif berkembang dan mengalami penyempurnaan secara berkala kurang lebih setiap 10 tahun. Sehingga di era ini tidak ada revisi kurikulum yang besar, sebab yang penyusunannya lebih pada penyempurnaan dari struktur yang lama. Perkembangan kurikulum ini juga mesti diselaraskan dengan amanah perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pengembangan kurikulum modern dan kaitannya dengan kegiatan instruksional (pembelajaran) setidaknya meliputi empat elemen dasar. Pertama, mengidentifikasi maksud dan tujuan pendidikan. Kedua, memilih pengalaman belajar atau proses pembelajaran yang relevan untuk pencapaian tujuan pendidikan. Ketiga, mengelola pengalaman belajar secara sistematis. Keempat, melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengalaman belajar yang sudah dikerjakan tersebut (Suparman, 2014) dalam Pardini (2018). Namun, pada kenyataannya, pemerintah seringkali mengganti kurikulum karena adanya pengembangan tujuan pembangunan nasional, sedangkan aspek-aspek lain yang semestinya juga diperhatikan menjadi dasar pengembangan kurikulum justru tidak dipertimbangkan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Kurikulum merupakan dasar atau acuan penyelenggaraan pendidikan yang sangat fundamental karena akan mempengaruhi kualitas luaran peserta didik. Di Indonesia perkembangan kebijakan terkait pemberlakuan kurikulum selalu mengalami perubahan. Dominasi pengaruh dari adanya perubahan tersebut adalah di antaranya, substansi kurikulum sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman, otoritas pemangku kebijakan, penyesuaian dengan rencana pembangunan nasional, serta untuk menyiapkan

peserta didik terhadap tantangan masa depan. Sehingga hampir setiap periode kepemimpinan Negara memiliki penobatan dalam pemberlakuan kurikulum pendidikan.

Transformasi kurikulum beranjak dari sebelum kemerdekaan, yang eksistensinya masih dalam otoritas kolonial belanda. Rancangan dan pelaksanaan pendidikan juga, hanya berorientasi pada kepentingan penjajahan kolonial. Ketika kemerdekaan Indonesia di proklamkan tahun 1945, seluruh system di Indonesia di rekontruksi kembali, termasuk pada bidang pendidikan. Mulai lahir kurikulum *leerplan* menjadi awal kurikulum pendidikan di Indonesia yang bentuknya masih sederhana. Perkembangan pemerintahan orde baru hingga orde lama perubahan kurikulum mengalami peningkatan yang signifikan, terutama untuk menjalankan cita UUD dan Pancasila. Kemudian kurikulum era reformasi, kekhasan kurikulum pada zaman ini yaitu mulai merambah *skill* atau keterampilan yang di masukan pada landasan pendidikan, di sempurnakan kembali pada fase kurikulum berbasis kompetensi, KTSP lalu kemudian K13. Dengan demikian kurikulum akan selalu mengalami perubahan, penyesuaian kepentingan, terutama untuk menjawab tantangan global.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alhamudin. 2014. *Sejarah Kurikulum di Indonesia*. Jurnal Nur El-Islam, Volume 1, Nomor 2, Oktober.
- Asri, M. 2017. *Dinamika Kurikulum di Indonesia*. Jurnal Program Studi PGMI, Volume 4, Nomor 2.
- Depdiknas. 2002, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Depdiknas.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Dokumen Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Marlina, Murni Eva. 2013. *Kurikulum 2013 yang Berkarakter*. JUPIIS Volume 5 Nomor 2.
- Paridini, Agung. 2017. *Kurikulum Indonesia: Dari Leerplan Menuju Kurikulum Nasional*. Jurnal Pendidikan Dompot Dhuafa, Vol 7, No. 2.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Nomor 22 Tahun 2006. *Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah*
- Putrayasa, Bagus. 2006. *Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK): Ancaman dalam Pengimplementasiannya*. (Online). ([http://pasca.undiksha.ac.id/images/img\\_item/717.doc](http://pasca.undiksha.ac.id/images/img_item/717.doc), Diakses pada 25 Desember 2020).
- Rahardjo, Toto. 2001. *Pendidikan Populer : Panduan Pendidikan Untuk Rakyat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Ritonga, Maimuna. 2018. *Politik Dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Hingga Masa Reformasi*. Jurnal Bina Gogik. Volume 5 No. 2.
- Wirianto, Dicky. 2014. *Perspektif Historis Transformasi Kurikulum di Indonesia*. Islamic Studies Journal | Vol. 2 No. 1.